SULAWESI TENGAH



RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

0451 421755

Dpmd.sultenoft

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.. 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra **9**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah **40** 40

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 34

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD..... 47

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 67

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 77

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 77

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 80

3.3 Program dan Kegiatan 82

BAB IV *RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 110*

4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan..... 110

BAB V PENUTUP..... 138

5.1 Kaidah Pelaksanaan 138

5.2 Penutup..... 140

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhoNya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RKP 2026 dan RKPD 2026 yang berisi rincian mengenai program, sasaran, dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun tahun sebelumnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, atas dukungan dan partisipasinya sehingga penyusunan Rencana Kerja ini dapat terwujud. Semoga Rencana Kerja ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan panduan kerja bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Palu, 20 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN
DESAPROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 1986003 1 009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang maju, mandiri dan sejahtera, selanjutnya diatur kembali dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk itu, dalam menjalankan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Fungsi meliput :

a. Perumusan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
e. Penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional tertentu, dan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan pencapaian Visi dan Misi Rencana Panjang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 "***Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan*** maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Rencana Kerja Perubahan sebagai bentuk pelaksanaan teknis urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-

2029 serta RKPD. Didasari hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tantang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah,

Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023-2042;
24. KLHS RPJMD Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

27. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
29. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk merumuskan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Rencana Strategis dan RKPD, sehingga lebih memantapkan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Renja menjadi acuan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dalam rangka mencapai visi dan

misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Renja sebagai dokumen yang merumuskan Program-program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2026, mengacu pada Renstra DPMD 2025-2029 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 .

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan kaidah Penyusunan Renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No. 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Isu-Isu Penting Penyeleanggaraan Tugas dan Fungsi
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program, dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Perkiraan Maju

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

5.2 Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Evaluasi sebagai sebagai salah satu metode yang berfungsi unutk peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui apakah kinerja utama dari Perangkat Daerah telah tercapai, termasuk didalamya meliputi program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dan 2025, berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, yakni untuk mengetahui:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi/ memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

- Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan 2025

  Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan 2025 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 didukung oleh pendanaan yang digunakan secara efektif dan efisien. Adapun Realisasi Belanja Operasional dicapai tahun 2024 adalah sebesar Rp. 27,734,629,991 dari jumlah pagu total Rp. 29.511.023.732 dengan tingkat capaian 93.98%

- Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2024

Alokasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 berdasarkan DPPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 29.511.023.732 terdiri dari:

a) Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 9.338.933.657

b) Belanja Langsung Rp. 20.172.090.075

Rincian realisasi belanja 2024 diuraikan sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12,399,540,498**	**11,001,244,469**	**88,72**
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**257,894,650**	**253,367,800**	**98,24**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,619,800	36,348,800	99,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,566,950	23,330,700	99,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197,707,900	193,688,300	97,97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**9,338,933,657**	**8,119,155,827**	**86,94**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,137,481,307	6,919,253,183	85,03

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,157,794,700	1,156,554,994	99,89
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43,657,650	43,347,650	99,29
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**73,571,350**	**73,104,030**	**99,36**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	73,571,350	73,104,030	99,36
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100,486,850**	**95,002,850**	**94,54**
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,219,850	6,135,850	54,69
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	89,267,000	88,867,000	99,55
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1,183,634,264**	**1,118,376,362**	**94,49**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,008,970	24,772,300	99,05
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	204,944,394	203,080,100	99,09
	Penyediaan bahan logistik kantor	50,000,000	49,843,000	99,69
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,000,100	29,226,600	97,42
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	873,680,800	811,454,362	92,88
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**304,462,350**	**303,000,000**	**99,52**
	Pengadaan mebel	29,835,000	29,650,000	99,38
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	274,627,350	273,350,000	99,53
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**325,713,432**	**238,041,915**	**73,08**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	325,713,432	238,041,915	73,08

	Air dan Listrik			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**814,843,945**	**801,195,685**	**98,33**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	215,209,100	204,480,600	95,01
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	214,310,000	214,157,500	99,93
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	385,324,845	382,557,585	99,28
2	**Program Penataan Desa**			
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	**2,742,946,550**	**2,632,150,505**	**95,96**
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	59,999,750	58,680,030	97,80
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	2,682,946,800	2,573,470,475	95,92
3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**			
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	**328,149,925**	**316,096,191**	**96,33**
	Fasilitasi Kerjasama Desadengan Pihak Ketiga	99,120,100	98,740,300	99,62
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	229,029,825	217,355,891	94,90
4	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	**3,895,315,650**	**3,852,631,068**	**98,90**

	Pemerintahan Desa			
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	160,123,700	159,123,700	99,38
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	167,571,900	158,019,452	94,30
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	704,999,650	700,704,670	99,39
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	129,999,800	126,910,520	97,62
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	184,890,500	183,164,113	99,85
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	2,487,730,050	2,465,275,583	99,10
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	60,000,050	59,433,030	99,05
5	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**10,145,071,109**	**9,932,507,758**	**97,90**

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	510,000,165	490,412,890	**96,16**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	487,044,500	478,179,500	98,18
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6,961,563,952	6,840,331,230	98,26
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	351,966,608	342,231,240	97,23
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	261,710,600	257,089,200	98,23
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50,000,100	49,985,100	99,97
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,472,784,916	1,424,886,998	96,75
	TOTAL ANGGARAN	**29,511,023,732**	**27,734,629,991**	**93,98**

- Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2025

Alokasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 berdasarkan DPPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp. 27. 425.704.598 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 9.625.343.861

b. Belanja Langsung Rp. 17.800.360.737

Rincian realisasi belanja 2025 (sd Triwulan II) diuraikan sebagai berikut :

	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN blm
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12,070,013,597**	**3,666,193,301**	**30,37**
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**136,147,650**	**-**	**-**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,865,000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,675,000	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111,607,650	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10,733,370,661**	**3,478,225,681**	**32,41**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,625,343,861	3,083,687,181	32,04
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,061,700,000	394,538,500	37,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46,326,800	-	-

	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**56,605,600**	**11,120,000**	**19,64**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	56,605,600	11,120,000	19,64
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**197,444,700**	**21,960,000**	**11,12**
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	32,960,000	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,050,000	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44,545,000	-	-
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	69,889,700	**21,960,000**	**31,42**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**321,205,400**	**25,432,500**	**7,92**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	77,826,300	-	-
	Penyediaan bahan logistik kantor	25,000,000	-	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218,379,100	25,432,500	11,65
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
	Pengadaan mebel	-	-	-
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**288,351,568**	**35,405,120**	**12,28**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288,351,568	**35,405,120**	**12,28**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**336,888,000**	**94,050,000**	**27,92**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	149,350,000	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187,538,000	94,050,000	50,15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-
2	**Program Penataan Desa**			
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	**3,572,485,350**	**-**	**-**
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	46,191,650	-	-
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	3,526,293,700	-	-
3	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**			
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	**135,315,450**	**-**	**-**
	Fasilitasi Kerjasama Desadengan Pihak Ketiga	30,573,450	-	-
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	59,828,100	-	-

	Fasilitasi Kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota	44,913,900	-	-
4	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**741,920,850**	**86,605,500**	**11,67**
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	45,139,900	42,819,900	94,86

	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	36,365,350	-	-
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	97,571,200	1,500,000	1,54
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	35,203,200	-	-
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	107,489,600	1,157,680	1,08
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	181,880,250	41,127,920	22,61
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	42,766,700	-	-
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	93,741,600	-	-
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa	24,713,250	-	-
	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	30,481,550	-	-
	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	46,568,250	-	-
5	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	**10,905,969,369**	**136,911,967**	**1,26**

	Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	185,323,960	-	-
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	97,116,500	-	-
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9,672,874,100	31,637,047	0,33
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	65,289,900	-	-
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	142,412,625	-	-
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	24,940,200	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	25,000,084	-	-
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	693,012,000	105,274,920	15,19

	Kesejahteraan Keluarga			
	TOTAL ANGGARAN	**27,425,704,598**	**3,889,710,768**	**14,18**

- Capaian Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2024 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Strategis "Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa" dengan indikator kinerja "Indeks Desa Membangun" dan Sasaran Strategis dengan indikator kinerja yaitu "Meningkatnya Status Perkembangan desa".

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pembaerdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan Tujuan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa dengan Indikator Indeks Desa (Indeks). Adapun Sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa) dengan Indikator yaitu: 1). Persentase Desa Mandiri (%) dan 2). Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya (Persentase).

Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024-2025 diuraikan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2025	
				Target Indeks, %	Realisasi Indeks, %	Target Indeks,%	Realisasi Indeks, %
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa Membangun	0,7180	0,7285	72,47	99.98
2.		Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa)	Presentase Desa Mandiri	12.595	15.147	23,78	20.95
			Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya (Persentase)	2.226	1.683	30,77	0.76

Perkembangan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

STATUS DESA BERDASARKAN IDM/ID PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024-2025			
No.	STATUS DESA	T A H U N	
		2024	2025
1	MANDIRI	279	386
2	MAJU	782	822
3	BERKEMBANG	750	620
4	TERTINGGAL	31	14
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0
TOTAL		1842	1842

PERSENTASE PERKEMBANGAN STATUS DESA BERDASARKAN IDM/ID PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024-2025		
STATUS DESA	T A H U N	
	2024	2025
MANDIRI	15.147	20.95
MAJU	42.291	44.62
BERKEMBANG	40.879	33.65
TERTINGGAL	1.683	0.76
SANGAT TERTINGGAL	0.000	0,000
TOTAL	100	99.98

Tabel 2.1											
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*											
Tahun 2025											
Kode	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)**	**Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2025**	**Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)**	**Target dan Reaslisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)**			**Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)**	**Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)**	**Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)**	
					Target Renja PD tahun n-2	**Realisasi Renja tahun n-2**	**Tingkat Realisasi % (t-n)**			**Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)**
			2025	**2022**	**2023**	**2023**	**2023**	**2024**	**2024**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10**	**11 = 5+7+10**	**12 = 11/4**
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2,12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**										

2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**64**	**60**	**62**	**60**	**60**	**64**	**70,30**	**199,3**	**311%**
2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**SAKIP**	**75**		**73**	**71**	**71**	**75**	**75**	**146**	**195%**
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	**100%**	4 dokumen	4 dokumen	13 dokumen	260%
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	**100%**	3 laporan	3 laporan	9 Laporan	225%
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2 laporan	4 laporan	4 laporan	**100%**	5 laporan	5 laporan	11 laporan	183%
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Realisasi Anggaran**	**97,00**	**89,00**	**97,00**	**96,00**	**99%**	**97,00**	**97,00**	**282**	**291%**
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/bulan	72 orang/bulan	72 orang/bulan	64 orang/bulan	**89%**	64 orang/bulan	64 orang/bulan	200 orang	313%
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100%**	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	600%

2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**100%**	3 Laporan	3 Laporan	10 Laporan	200%
2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	**300%**
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	3 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	125%
2.13.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasaan Masyarakat (customer/Stakeholder)**	**80,00**	**1 Laporan**	**78,00**	**80.77**	**80.77**	**78,00**	**78,00**	160,77	**201%**
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	-	-	2 paket	200%
2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**100%**	2 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	200%
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	**100%**	-	-	1 Laporan	50%
2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	95 org, 6 kali	12 orang	160 Orang	160 orang	**100%**	95 org, 4 kali	95 org, 4 kali	552	97%

2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	95 org, 2 Kali	12 Orang	380 Orang	380 orang	**100%**	-	-	408	107%
2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	300%
2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	1 paket	1 paket	3 paket	100%
2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	1 paket	2 paket	2 paket	**100%**	3 paket	3 paket	6 paket	100%
2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	-	-	2 paket	50%
2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	4 paket	4 paket	4 paket	**100%**	4 paket	4 paket	12 paket	150%
2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100%**	2 paket	2 paket	4 paket	100%

2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**100%**	10 Laporan	10 Laporan	9 Laporan	90%
2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	**300%**
2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	-	2 unit	2 unit	100%	-	-	2 unit	67%
2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Paket	-	32 Paket	32 Paket	100,00%	2 Paket	2 Paket	34 Paket	106%
2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	86 Unit	86 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	110 Unit	5500%
2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	1 Unit	100%
2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**300%**
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	-	-	5 Laporan	125%
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	92%	12 laporan	12 laporan	35 Laporan	292%

2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**3 Dokumen**	**300%**
	Pemerintahan Daerah										
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 unit	18 unit	31 unit	92 unit	297%	53 unit	53 unit	163 unit	526%
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	44 Unit	2 unit	44 unit	44 unit	100%	33 Unit	33 Unit	79 unit	180%
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	1 Unit	1 Unit	4 unit	400%
2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	2 paket	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2.13.02	**Program Penataan Desa**	**Presentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar**	**3.257**	**7,546**	**3.257**	**2,389**	**0%**	**3.257**	**3.257**	**16,015**	**491,710 %**

2.13.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**300%**
2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 dokumen	-	-	0%	-	-	2 Dokumen	100%
2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	4 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	4 dokumen	100%
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	6 Dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	9 dokumen	150%
2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	39 Unit	20 Unit	104 unit	104 unit	100%	24Unit	24Unit	148 unit	379%
2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa dan Kawasan Perdesaaan**	**0.380**	**1.249**	**1.629**	**0.651**	**#VALUE!**	**0.380**	**0.380**	**3,746**	**986%**

2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**300%**
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	-	-	4 Dokumen	100%
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	8 Dokumen	4 Dokumen	-	-	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	75%
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokumen	5 Dokumen	7 dokumen	7 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	16 dokumen	267%
2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang di Kelola secara Efektif dan Efisien**	**10,858**	**10,152**	**5,429**	**13,572**	**249,99%**	**10,858**	**10,858**	**43,431**	**400%**
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1 Laporan	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**300%**

2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	11 dokumen	550%

2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang ditetapkan	4 Dokumen	4 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	-	-	0%
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dlm penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	5 dokumen	500%
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	0%	-	-	3 Dokumen	100%
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	0%	-	-	3 Dokumen	100%
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Kab	-	-	-	0%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	2 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	21 dokumen	420%
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	11Dokumen	220%

2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	56 Org	97 org	56 org	56 org	100%	76 Org	76 Org	229 org	409%
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 org	-	-	-	0%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	6 Dokumen	-	-	-	0%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	77 Orang	-	-	-	0%	-	-	-	-
2.13.04.1.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	275%

2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	350%
2.13.04.1.01.17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	-	-	6 Dokumen	100%
2.13.04.1.01.18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	133%
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	-	-	6 Dokumen	600%
2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	24 Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.04.1.01.22	Fasilitasi Penetapan Kewenangangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**1,810**	**2,320**	**1,448**	**2,776**	**100%**	**1,810**	**1,810**	**9,186**	**508%**
2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**300%**
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	=	-	-	2 Dokumen	**100%**

2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Dokumen	13 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	21 dokumen	420%
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	80 Lembaga	120 Lembaga	125 Lembaga	125 Lembaga	100%	275 Lembaga	275 Lembaga	520 Lembaga	650%
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40 unit	52 Unit	85 Unit	81 Unit	95%	66 unit	66 unit	199 Unit	498%

2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	9 dokumen	450%
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	9 dokumen	450%
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	100%
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	8 dokumen	267%
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Laporan	6 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	29 Laporan	363%
2.13.05.1.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-

2.13.05.1.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut: Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 (Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024).

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2025 dan Prakiraan Maju 2026-2027

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun						Tahun		Tahun		
				2025	2026	2027	2028	2029	2029	2024	2025	2026	2027	
1			2	5	6	7	8	8		9	10	11	12	13
1	**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa**	**Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa)**	Indeks Desa	72,47	72,63	72,79	72,95	73,11	73,27	0.7285 (IDM)		72,47	72,63	Pengukuran Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025-2029 berdasarkan Indeks Desa (ID)
			Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	23,78	24,05	24,32	24,59	24,59	25,13	15.15		24,05	24,32	
			Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya	30,77	61,54	92,31	100	0	0			61,54	92,31	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh ketersedian SDM dan sarana prasarana serta pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tidak tersedianya SDM yang mendukung dan sarana prasarana serta tidak terciptanya koordinasi, dan sinkronisasi yang baik akan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja.

- Kendala dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan Tupoksi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;

3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;
4. Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat tantangan dan peluang yang berasal dari lingkungan ekseternal dan lingkungan internal yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah yang secara langsung berdampak bagi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- **Tantangan dan Peluang**

Analisis lingkungan internal

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akanmendukung kelangsungan hidup organisasi.

Identifikasi faktor internal:

1. Kekuatan

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan srategis dalam mencapai visi dan misi. Adapun kekuatan yang dimiliki sebagai berikut:

a. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
c. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 2004 Nomor: 410/2917/SJ perihal Pengaturan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
d. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Juni 2005 Nomor:

410/1320/SJ perihal Institusi Pembina Penyelenggara Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah.

e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
f. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
g. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
h. Tersedianya kuantitas SDM.
i. Tersedianya Dana pada APBD.
j. Tersedianya Sarana yang memadai.

2. Kelemahan

Kelemahan adalah situasi dan factor-faktor luar organisasi yang bersifat negative, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi.

Adapun kelemahan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tupoksi yang masih tumpang tindih baik secara internal (antar bidang) maupun External (antar SKPD);
b. Database dan System Information Management masih lemah.
c. Terbatasnya Dana Operasional Kegiatan.
d. Kinerja aparat yang belum optimal.
e. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal.
f. Tenaga fungsional belum terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas.

- **Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factors) bagi sesuatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk meningkatkan peran organisasi dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.

Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi disekeliling organisasi yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Pemahaman pada lingkungan eksternal akan memberikan masukan pemahaman pada organisasi mengenai kondisi dan situasi organisasi.

Peluang

a. Telah terbentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
b. Adanya Program-program Kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi.
c. Adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
d. Tersedianya lembaga kemasyarakatan serta kader-kader pemberdayaan masyarakat.
e. Adanya Kepedulian Masyarakat terhadap program-program Pemberdayaan serta dukungan partisipasi masyarakat.
f. Partisipasi dan sumber daya alam di perdesaan.

Tantangan

a. Target pengentasan desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah belum tercapai.
b. Jumlah Desa Mandiri masih sangat rendah.
c. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup besar;
d. Luasnya wilayah perdesaan dan jumlah desa sasaran yang cukup banyak dalam pelaksanaan program kegiatan;
e. Masih rendahnya pemahaman Pemerintah Desa dan Masyarakat terhadap hakekat Pemberdayaan;
f. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Kelompok-kelompokmasyarakat dan Lembaga kemasyarakat di perdesaan;
g. Prasarana dan sarana perdesaan yang kurang memadahi;
h. Belum optimalnya Pelayanan publik pemerintahan Desa.
i. Keterpencilan lokasi desa, baik di kepulauan maupun di pegunungan.

Mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

a. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan prioritas pengentasan desa tertinggal, mengurangi jumlah desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri.
b. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
c. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
d. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai

dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

e. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

f. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

g. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

h. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasarandan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target RENJA DINAS PEEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 maka kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, selengkapnya kebutuhan program dan kegiatan dengan target dan pendanaan sebagaimana tabel terlampir:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Tabel 2.4											
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025											
Perangkat Daerah		: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah									
Periode / Tahun		: 2025									
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	Rp 6	7	8	9	10	Rp 11	12
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				Rp 38.027.200.000					Rp 41.829.920.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi dan 12 Kab	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71,00	Rp 13.661.807.432	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi dan 12 Kab	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71,00	Rp 15.027.988.175	

	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Provinsi dan 12 Kab**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**84,00**	**Rp 307.640.000**	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Provinsi dan 12 Kab**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**83,00**	**Rp 338.404.000**	
			Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah					**Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah**		**Rp -**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Provinsi**	**Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah**	**6 dokumen**	**Rp 36.900.000**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah**	**6 dokumen**	**Rp 40.590.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Provinsi dan 12 Kab**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**5 Laporan**	**Rp 20.740.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Provinsi dan 12 Kab**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**5 Laporan**	**Rp 22.814.000**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Provinsi dan 12 Kab**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Laporan**	**Rp 250.000.000**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Provinsi dan 12 Kab**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Laporan**	**Rp 275.000.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Provinsi**	**Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP**	**100%**	**Rp 10.997.410.050**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP**	**100%**	**Rp 12.097.151.055**	

			Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah					**Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah**		**Rp -**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Provinsi**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**64 Orang**	**Rp 9.792.060.000**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Provinsi**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**64 Orang**	**Rp 10.771.266.000**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**Provinsi**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**12 Kegiatan**	**Rp 1.125.350.000**	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Provinsi**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**12 Kegiatan**	**Rp 1.237.885.000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Provinsi**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**13 Laporan**	**Rp 80.000.050**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Provinsi**	**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**13 Laporan**	**Rp 88.000.055**	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Provinsi dan Kab**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**1 Dokumen**	**Rp 120.000.200**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Provinsi dan Kab**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**1 Dokumen**	**Rp 132.000.220**	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**1 Dokumen**				**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**Rp -**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	**Provinsi dan Kab**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah**	**2 Laporan**	**Rp 120.000.200**	**Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD**	**Provinsi dan Kab**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah**	**2 Laporan**	**Rp 132.000.220**	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Provinsi**	**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**		**Rp 284.000.650**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Provinsi**	**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**		**Rp 312.400.715**	
	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**Provinsi**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan**	**1 paket**	**Rp -**	**Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**Provinsi**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan**	**1 paket**	**Rp -**	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Provinsi**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**2 Dokumen**	**Rp 50.000.050**	**Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**Provinsi**	**Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**2 Dokumen**	**Rp 55.000.055**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Provinsi**	**Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**1 Laporan**	**Rp 64.000.250**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Provinsi**	**Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**1 Laporan**	**Rp 70.400.275**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Provinsi**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**120 orang**	**Rp 120.000.200**	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**Provinsi**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**120 orang**	**Rp 132.000.220**	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	**Provinsi dan 12 Kab**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**3 orang**	**Rp 50.000.150**	**Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**	**Provinsi dan 12 Kab**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**3 orang**	**Rp 55.000.165**	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Provinsi dan 12 Kab**	**Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah**		**Rp 762.871.770**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Provinsi dan 12 Kab**	**Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah**		**Rp 839.158.947**	
			Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah					**Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah**		**Rp -**	
			Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI					**Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI**		**Rp -**	
			Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah					**Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah**		**Rp -**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Provinsi**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1 paket**	**30.000.000**	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	**Provinsi**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**1 paket**	**Rp 33.000.000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	**Provinsi**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**2 paket**	**Rp 123.548.970**	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	**Provinsi**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**2 paket**	**Rp 135.903.867**	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	**Provinsi**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**1 paket**	**Rp -**	**Penyediaan peralatan rumah tangga**	**Provinsi**	**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan**	**1 paket**	**Rp -**	

	Penyediaan bahan logistik kantor	**Provinsi**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan**	**2 paket**	**Rp 50.000.000**	**Penyediaan bahan logistik kantor**	**Provinsi**	**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan**	**2 paket**	**Rp 55.000.000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**Provinsi**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1 paket**	**Rp 30.000.000**	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	**Provinsi**	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	**1 paket**	**Rp 33.000.000**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Provinsi dan 12 Kab**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**2 Laporan**	**Rp 529.322.800**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Provinsi dan 12 Kab**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**2 Laporan**	**Rp 582.255.080**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Provinsi**	**Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE**		**Rp 362.002.502**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Provinsi**	**Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE**		**Rp 398.202.752**	
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Rp -**	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	**Provinsi**	**Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**	**1 unit**	**Rp -**	**Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan**	**Provinsi**	**Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**	**2 unit**	**Rp -**	
	Pengadaan mebel	**Provinsi**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**2 set**	**Rp 68.387.000**	**Pengadaan mebel**	**Provinsi**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**32 set**	**Rp 75.225.700**	

	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	**Provinsi**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**2 paket**	**Rp 293.615.502**	**Pengadaan peralatan dan mesin lainnya**	**Provinsi**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**86 unit, 2 paket**	**Rp 322.977.052**	
	Pengadaan aset tetap lainnya	**Provinsi**	**Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan**	**0**	**Rp -**	**Pengadaan aset tetap lainnya**	**Provinsi**	**Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan**	**1 paket**	**Rp -**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Provinsi**	**Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah**		**Rp 328.532.260**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Provinsi**	**Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah**		**Rp 361.385.486**	
			Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi					**Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi**		**Rp -**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Provinsi**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**0 Laporan**	**Rp -**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Provinsi**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**0 Laporan**	**Rp -**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Provinsi**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**12 Laporan**	**Rp 328.532.260**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Provinsi**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**12 Laporan**	**Rp 361.385.486**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Provinsi**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**1 Dokumen**	**Rp 499.350.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Provinsi**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**1 Dokumen**	**Rp 549.285.000**	

			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp -	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 unit	Rp 181.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 unit	Rp 199.485.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	Rp 218.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	Rp 239.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1 Paket	Rp 100.000.000	Pemeliharaan/Rehabi-litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1 Paket	Rp 110.000.000	
		Provinsi dan 12 Kab	Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	0.27 (ID)			Provinsi dan 12 Kab	Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	0.27 (ID)	Rp -	
	Program Penataan Desa	12 Kab	Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa		Rp 3.050.700.200	Program Penataan Desa	12 Kab	Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa		Rp 3.355.770.220	
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	12 Kab	Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa		Rp 3.050.700.200	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	12 Kab	Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa		Rp 3.355.770.220	

	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Rp -	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	-	Rp -	
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	12 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2 Dokumen	Rp 100.000.200	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	12 Kab	Jumlah Desa yang terdampingi dalam pengaturan SOTK Pemerintahan Desa sesuai regulasi		Rp 110.000.220	
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	42 Unit	2.950.700.000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Jumlah prasarana dan sarana pelayanan Pemerintahan Desa yang terpenuhi		Rp 3.245.770.000	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	12 Kab	Nilai dimensi Ekonomi		Rp 479.849.850	Program Peningkatan Kerjasama Desa	12 Kab	Nilai dimensi Ekonomi		Rp 527.834.835	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Nilai sub Dimensi Produksi Desa		Rp 479.849.850	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	12 Kab	Nilai sub Dimensi Produksi Desa		Rp 527.834.835	
			Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi					Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi		Rp -	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Rp 89.924.925	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	Jumlah Desa yang terdampingi dalam kerjasama antar desa dan Kabupaten/Kota		Rp 98.917.418	

	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan**	**7 Dokumen**	**Rp 89.924.925**	**Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga**	**12 Kab**	**Jumlah desa yang mengikuti bimbingan teknis kerjasama antara desa dan pihak ketiga**		**Rp 98.917.418**	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	**Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali**	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan**	**12 Dokumen**	**Rp 300.000.000**	**Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan**	**Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali**	**Jumlah BUMDesma yang terdampingi dalam peningkatan Potensi produk unggulan desa**		**Rp 330.000.000**	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**12 Kab**	**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**		**Rp 5.056.001.050**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**12 Kab**	**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**		**Rp 5.561.601.155**	
			Nilai dimensi Ekonomi					**Nilai dimensi Ekonomi**		**Rp -**	
			Nilai dimensi lingkungan					**Nilai dimensi lingkungan**		**Rp -**	
			Nilai dimensi Aksebilitas					**Nilai dimensi Aksebilitas**		**Rp -**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**12 Kab**	**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**		**Rp 5.056.001.050**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**12 Kab**	**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**		**Rp 5.561.601.155**	

			Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi					**Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi**		**Rp -**	
			Nilai sub dimensi pengelolaan lingkungan					**Nilai sub dimensi pengelolaan lingkungan**		**Rp -**	
			Nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan					**Nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan**		**Rp -**	
			Nilai sub dimensi Kemudahan Akses					**Nilai sub dimensi Kemudahan Akses**		**Rp -**	
			Nilai Sub Dimensi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)					**Nilai Sub Dimensi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)**		**Rp -**	
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa**	**4 Dokumen**	**Rp 144.000.400**	**Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa**	**12 Kab**	**Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang meningkat kapasitasnya**		**Rp 158.400.440**	
								Jumlah Terselenggaranya pelaksanaan PILKADES di Kabupaten	**12 Kab.**	**Rp -**	
								Jumlah Desa yang dapat mengaplikasikan Pelayanan Berbasis Digital	**20 Desa**	**Rp -**	

	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan**	**4 Dokumen**	**Rp -**	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa**	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan**	**4 Dokumen**	**Rp -**	
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa**	**4**	**Rp 100.000.200**	**Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa**	**12 Kab**	**Jumlah Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa**	**4**	**Rp 110.000.220**	
								Jumlah Desa yang memmanfaatkan Data Registrasi Sosial (REGSOSEK)		**Rp -**	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	**3 Dokumen**	**Rp 50.000.000**	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**	**-**	**Rp 55.000.000**	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan**	**3 Dokumen**	**Rp 300.000.000**	**Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan**	**12 Kab**	**Jumlah desa dan kelurahan yang terevaluasi dalam perkembangan desa dan kelurahan (Epdeskel)**		**Rp 330.000.000**	

								Jumlah Desa dan Kelurahan yang memenuhi tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	**12 Desa / 13 Kel**	**Rp -**	
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan**	**3 Dokumen**	**Rp 80.000.250**	**Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan**	**12 Kab**	**Jumlah Aparatur Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek penyusunan Profil Desa dan Kelurahan**		**Rp 88.000.275**	
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	**12 Kab**	**Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina**	**140 Orang**	**Rp 250.000.050**	**Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa**	**12 Kab**	**Jumlah Desa yang mengikuti Bimtek Percontohan Desa Anti Korupsi**		**Rp 275.000.055**	
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis**	**6 Dokumen**	**2.482.000.000**	**Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis**	**12 Kab**	**Jumlah Bumdes yang memperoleh penyediaan sarana dan prasarana**		**Rp 2.730.200.000**	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa**	**2 Dokumen**	**Rp 1.550.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa**	**12 Kab**	**Jumlah BUMDES yang terbina dalam Peningkatan Kapasitas**		**Rp 1.705.000.000**	

	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa**	**2 Dokumen**	**Rp 100.000.150**	**Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa**	**12 Kab**	**Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Desa**		**Rp 110.000.165**	
								Jumlah Desa yang mengusulkan untuk diidentifikasi penetapan dan Penegasan Batas Desanya		**Rp -**	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa**	**0**	**Rp -**	**Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa**	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa**	**-**	**Rp -**	
	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	**12 Kab**	**Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi**	**0**	**Rp -**	**Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa**	**12 Kab**	**Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi**	**-**	**Rp -**	
	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	**12 Kab**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa**	**0**	**Rp -**	**Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa**	**12 Kab**	**Jumlah kabupaten yang terdampingi dalam pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa**	**0**	**Rp -**	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**12 Kab**	**Nilai dimensi layanan dasar**		**Rp 15.778.841.468**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**12 Kab**	**Nilai dimensi layanan dasar**		**Rp 17.356.725.615**	

			Nilai dimensi Sosial					**Nilai dimensi Sosial**		**Rp -**	
			Nilai dimensi Ekonomi					**Nilai dimensi Ekonomi**		**Rp -**	
			Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa					**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**		**Rp -**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**12 Kab**	**Nilai Sub dimensi Pendidikan**		**Rp 15.778.841.468**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**12 Kab**	**Nilai Sub dimensi Pendidikan**		**Rp 17.356.725.615**	

			Nilai Sub dimensi Kesehatan					**Nilai Sub dimensi Kesehatan**		**Rp -**	
			Nilai Sub Dimensi Utilitas Dasar					**Nilai Sub Dimensi Utilitas Dasar**		**Rp -**	
			Nilai sub Dimensi Produksi Desa					**Nilai sub Dimensi Produksi Desa**		**Rp -**	
			Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa					**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**		**Rp -**	
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat**	**1 Dokumen**	**Rp -**	**Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat**	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat**	**1 Dokumen**	**Rp -**	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,**	**13 Dokumen**	**Rp 100.000.000**	**Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan**	**12 Kab**	**Jumlah LKD, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang dibina dalam penataan kelembagaan**		**Rp 110.000.000**	

	Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		**Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**			**Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	**12 Kab**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya**	**130 Lembaga**	**Rp 303.400.400**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**	**12 Kab**	**Jumlah Pengurus LKD, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya**		**Rp 333.740.440**	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	**12 Kab**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**	**126 Dokumen**	**Rp 13.803.440.000**	**Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**	**12 Kab**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**		**Rp 15.183.784.000**	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**	**3 Dokumen**	**Rp 400.000.000**	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**	**12 Kab**	**Jumlah masyarakat yang terbimbing dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat**		**Rp 440.000.000**	
								Jumlah Bumdes yang memperoleh sarana pengembangan Usaha ekonomi kreatif masyarakat		**Rp -**	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**	**2 Dokumen**	**Rp 250.000.000**	**Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**	**12 Kab**	**Jumlah posyantek yang mengikuti Bimtek Pengembangan Kapasitas Posyantek dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**		**Rp 275.000.000**	
								Jumlah posyantek yang mempeeroleh sarana penerapan dan pemanfaatan Teknolgi Tepat Guna untuk potensi produk unggulan desa		**Rp -**	

	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong		**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**	**1 Laporan**	**Rp 86.000.450**	**Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong**		**Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai gotong royong**		**Rp 94.600.495**	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	**12 Kab**	**Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa**	**3 Dokumen**	**Rp 86.000.618**	**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa**	**12 Kab**	**Jumlah peralatan Pelaksanaan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)yang disediakan**		**Rp 94.600.680**	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	**12 Kab**	**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**5 Laporan**	**Rp 750.000.000**	**Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**12 Kab**	**Jumlah Hasil Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**		**Rp 825.000.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa, maka melalui Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dilakukan upaya konkrit untuk menjawab isu- isu strategis tersebut yaitu dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari pemangku jabatan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
2	3	4	5	6
PROGRAM PENATAAN DESA		**Presentase Kelembagaan Desa yang ditata Sesuai Standar**		
Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		**Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**		
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Rp 2.950.700.000	
	- Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi		Rp 100.000.000,00	
	- Desa Tolai, Kecamatan Torue		Rp 150.000.000,00	
	- Desa Taliabo, Kecamatan Sausu		Rp 40.000.000,00	
	- Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai		Rp 100.000.000,00	
	- Jl.Sarikaya Kel.Kamonji Kec.Palu Barat		Rp 60.000.000,00	
	- Desa Watatu Kec Banawa Tengah Kab Donggala		Rp 60.000.000,00	
	- Desa Tomoli Kecamatan Toribulu		**Rp 50.000.000,00**	
	- Desa posona Kecamatan kasimbar		**Rp 50.000.000,00**	
	- Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa		**Rp 50.000.000,00**	
	- Desa Moubang Kecamatan Mepanga		**Rp 80.000.000,00**	
	- Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga		**Rp 60.000.000,00**	

	- Desa moubang Kecamatan mepanga		**Rp 60.000.000,00**	
	- Desa Siboang Kec. Sojol, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Ogoamas II Kec. Sojol Utara, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Balukang Kec. Sojol , Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Bengkoli Kec. Sojol Utara, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Siwalempu Kec. Sojol , Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- DESA BAHODOPI KEC. BAHODOPI KAB. MOROWALI, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 92.500.000,00	
	- DESA PANIMBAWANG KEC. BUNGKU SELATAN KAB. MOROWALI, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 180.000.000,00	
	- Desa Suli Kec. Balinggi , Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 38.000.000,00	
	- Eeya, Kec. Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah 94476, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Buranga, Kec. Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah 94474, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 65.000.000,00	
	- kantor kelurahan panasakan kecamatan baolan kabupaten tolitoli		Rp 100.000.000,00	
	- Desa Tabulang, Dan Desa Sundeng Kecamatan Bangkurung, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 22.500.000,00	
	- Desa Monsongan, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 27.500.000,00	
	- DESA TULO RANTEA , KEC. DOLO, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur GCM8+G5F, Tamadue, Kec. Lore Tim., Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah 94653, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Kelompok Tani VAVO LEMBO Desa Lahuafu Kecamatan Bungku Timur, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 340.200.000,00	
	- Desa Rogo Kec. Dolo Selatan		Rp 35.000.000,00	
	- Desa Dalaka Kec. Sindue		Rp 35.000.000,00	
	- Molino, Luwuk Tim., Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94723, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 60.000.000,00	
	- Dwipa Karya, Kec. Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94753, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 60.000.000,00	
	- Jaya Kencana, Kec. Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94765, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 60.000.000,00	
	- Biak, Kec. Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94716, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- DESA JONO OGE, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 40.000.000,00	
	- Desa Onepute, Kec Bungku Timur, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 65.000.000,00	
	- Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 55.000.000,00	
	- Ompo Didiri, Kec. Pamona Tim., Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah		Rp 15.000.000,00	
	- Desa Bangga Kec. Dolo Selatan		Rp 40.000.000,00	

	- Desa Tanjung Padang, Kec. Sirenja		Rp 80.000.000,00	
	- Desa Balamoa Kec. Dolo Barat		Rp 30.000.000,00	
	- Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**		
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten**		
Sub Kegiatan :Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 13.803.440.000,00	
	- Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 60.000.000,00	
	- Kel. Balantang, Kec. Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 120.000.000,00	
	- Dusun 1 Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong		Rp 50.000.000,00	

	- Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong		Rp 120.000.000,00	
	- Desa Nggawia, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo una-una, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Tombiano, kec. tojo barat, kab. tojo una-una, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- kel. sayo, kec. poso kota selatan, kab. poso, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Budi Mukti, Kecamtan Dampelas, Kabupaten Donggala		Rp 80.000.000,00	
	- Wilayan RW 001, Kelurahan Petobo ,Kecamatan Palu selatan - Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- Wilayah Rt,004,005,006 Kelurahan Petobo, Palu Selatan - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Nunumbuku ,kelurahan Poboya, Kec Mantikulore - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- jalan batu bata indah, Kelurahan Birobuli utara, Palu Selatan - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Nambo, Kelurahan Petobo Palu selatan-Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- BTN Petobo blok D1 No.10 Kelurahan Petobo,Palu selatan - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- BTN Bukit Sira Blok 1/3 Kelurahan duyu, tatanga - Kota palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Simpotove Barat Huntap Tondo,Kelurahan tonda, Mantikulore- Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Jati 2,Kelurahan Nunu,Tatanga - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Banteng no.11,Kelurahan Birobuli Selatam - Palu Selatan kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Sulawesi NO.44a Lolu Utara, Palu timur - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Ahmad Yani no.1 ,Kelurahan Birobuli Utara, Palu Timur- Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jl.Tg Harapan No.37, Kelurahan Tatura Utara, Palu Selatan - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- jalan Setia budi Lr.Perjuangan No.92, Kelurahan Besusu timur, Palu timur- Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jl.Togoa, Kelurahan Kawatuna, Kec Mantikulore - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Perumahan Mahkota indah II kenanga, Kelurahan Lasoani, Kec Mantikulore - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jl.yos Sudarso No.31, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- jl.Monginsidi lr.5 , Kelurahan Lolu Selatan, Palu timur		Rp 100.000.000,00	
	- Jln. Ks Tubun,Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur - Kota Palu -		Rp 100.000.000,00	
	- jl.Balaikota Timur NO.3, Kelurahan tanamodindi, Kec Mantikulore - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- jalan Sis aljufri, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan tatanga - Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Beringin, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga- Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- jalan Jamur lorong 2, Kelurahan Boyaoge, Tatanga - Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- jalan gunung loli no.3 , Kelurahan lolu Utara, Palu Timur - Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	

	- jalan Munif Rahman 1 lr.Holiwood, Kelurahan kabonena, Ulujadi - kota palu, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- jalan malontara, Kelurahan Pengawu, Tatanga - Kota Palu -0.926389, 119.845941, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- jalan BTN angsana tamaria Estate,Kelurahan Kabonena,Ulujadi - Kota Palu , Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- jalan igusti ngurahrai,kelurahan Tatura selatan ,Palu selatan - kota palu, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Asam 2 Lorong 5, Kelurahan Lere, Palu Barat - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Sungai Ogotion, kelurahan Nunu, Tatanga - Kota Palu , Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan PS.Harimau, Kelurahan Boyaoge, Tatanga - Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- Jalan Kenari, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga - Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- jalan tanggul Selatan No.21.Kelurahan birobuli utara , Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- jalan simpotove barat xiv no.37 kelurahan Tondo, Mantikulore - Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- jalan pelita air permai, kelurahan birobuli selatan, Palu selatan - Kota palu , Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- Desa Jono oge, Kec.Sigi Biromaru, Kab.Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 60.000.000,00	
	- Desa Berdikari, Kec.Palolo, Kab.Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 60.000.000,00	
	- Desa Waturalele, Kec. Dolo, Kab.Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 60.000.000,00	
	- Desa Onu, kec.Pipikoro, Kab.Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 60.000.000,00	
	- Desa Tomado, Kec.Lindu, Kab.Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 60.000.000,00	
	- Jl. Garuda Gang Mataram, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan		Rp 61.000.000,00	
	- Jl. Veteran No. 155, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore		Rp 61.000.000,00	
	- Jl.Datu Kumbili Kel.Kayumalue Pajeko Kec.Palu Utara		Rp 80.000.000,00	
	- Jl.Belimbing Kel.Kamonji Kec.Palu Barat		Rp 80.000.000,00	
	- Jl.Lembu Kel.Tatura Selatan Kec.Palu Selatan		Rp 80.000.000,00	
	- Jl.Sarombone Kel.Baiya Kec.Taweli		Rp 80.000.000,00	
	- Jl.Wahidin Lorong Apotik Kaili Farma Kel.Besusu Barat Kec.Palu Timur		Rp 80.000.000,00	
	- RT 2 RW 03 Kel.Talise Valangguni Kec.Mantikulore		Rp 80.000.000,00	
	- Kel.Tatura Selatan Kec.Palu Selatan		Rp 80.000.000,00	
	- Kel.Tondo Kec.Mantikulore		Rp 80.000.000,00	
	- Desa Lamadong II Kecamatan Momunu, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 100.000.000,00	
	- JALAN JAJAKI RAYA KEL.PETOBO KEC.PALU SELATAN KOTA PALU		Rp 61.440.000,00	
	- Desa Tindaki kec. Parigi Selatan		Rp 50.000.000,00	

	- Desa Dolago padang, Kec. Parigi Selatan		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Dolago induk, kec. Parigi Selatan		Rp 50.000.000,00	
	- Tatarandang, Kec. Bulagi Sel., Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94881, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Desa Pelinglalomo, Kec. Buko, Kab. Bangkep, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Bakalinga, Kec. Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94882, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Okulo Potil, Kec. Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Kantor Desa Malanggong, Kec. Buko, Kab. Bangkep, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Labasiano, Kec. Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94881, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Desa Lumbi-lumbia, Kec. Buko Selatan, Kab. Bangkep		Rp 150.000.000,00	
	- Toi-Toi, Kec. Bulagi Sel., Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94882, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Okulo Potil, Kec. Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94881, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Desa Seano, Kec. Buko Selatan, Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Olusi, Kec. Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94881, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Desa Kancuu Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso		Rp 75.000.000,00	
	- Desa Matako Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una		Rp 75.000.000,00	
	- Desa Rompo Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso		Rp 75.000.000,00	
	- Desa Kaduwaa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso		Rp 75.000.000,00	
	- Desa Soe Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso		Rp 75.000.000,00	
	- Desa Torire Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso		Rp 75.000.000,00	
	- Desa Nupa Bomba Kec. Tanantovea, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Siwalempu Kec. Sojol , Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Kelurahan Tambun Kecamatan Baolan		Rp 56.000.000,00	
	- Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan		Rp 56.000.000,00	
	- Kelurahan Mangkio Baru, Banggai		Rp 70.000.000,00	
	- Desa Marga Kencana, Kec. Toili Jaya		Rp 70.000.000,00	
	- Kelurahan Maahas, Luwuk Selatan		Rp 60.000.000,00	
	- Desa Singkoyo, Kec. Toili		Rp 35.000.000,00	
	- Desa Sentral Timur, Kec. Toili		Rp 45.000.000,00	

	- Desa Tatakalai, Tinangkung Utara, Banggai Kepulauan		Rp 30.000.000,00	
	- Desa Balukang Kecamatan Sojol Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 200.000.000,00	
	- Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 150.000.000,00	
	- Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue		Rp 38.000.000,00	
	- DESA LENDE KECAMATA SIRENJA KABUPATEN DONGGALA		Rp 34.000.000,00	
	- Marantale, Kec. Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 25.000.000,00	
	- Kantor, Malakosa, Kec. Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah 94473, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 65.000.000,00	
	- kelurahan baru kecamatan baolan kabupaten Tolitoli		Rp 200.000.000,00	
	- Desa Tinading Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli		Rp 125.000.000,00	
	- Desa Lantapan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli		Rp 125.000.000,00	
	- Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 35.000.000,00	
	- Desa Toi-toi, Kec. Bulagi Selatan, Kab. Bangkep, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 99.500.000,00	
	- Lalengan, Kec. Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94881, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 99.500.000,00	
	- Desa Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah 94351, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 80.000.000,00	
	- Jl. Mamboro, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 76.000.000,00	
	- Jl. Banteng Blok O, No.5, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Tatura Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 48.000.000,00	
	- Kelurahan Talise, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 25.000.000,00	
	- Kelurahan Birobuli Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 25.000.000,00	
	- Desa Kamumu Kec Luwuk Utara Kab Banggai		Rp 60.000.000,00	
	- Kel. Boya Kec. Banawa https://maps.app.goo.gl/Ndu6353w2NDx8gA26,		Rp 35.000.000,00	
	- Kilongan, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94711, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 115.000.000,00	
	- Bantayan, Luwuk Tim., Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94723, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 120.000.000,00	
	- Jl. Trans Peling, Sabang, Kec. Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94882, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 120.000.000,00	
	- Bunta Satu, Kec. Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94753, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 115.000.000,00	
	- Cendanapura, Kec. Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94765, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- DESA WATATU Kec Banawa Tengah Kab Donggala		Rp 59.400.000,00	
	- DESA LABEAN		Rp 82.000.000,00	
	- DUSUN 2 DESA SIPI		Rp 82.000.000,00	

	- DUSUN 1, DESA KALIBURU		Rp 82.000.000,00	
	- DUSUN 1, PILIMAKUJAWA, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 82.000.000,00	
	- DUSUN 3, DESA SIBALAYA BARAT, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 82.000.000,00	
	- DESA TOMADO, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 82.000.000,00	
	- DESA PUROO, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 82.000.000,00	
	- DESA SALUA, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 82.000.000,00	
	- DESA WINATU, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 82.000.000,00	
	- DESA SIWONGI, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 40.000.000,00	
	- DESA TOWULU, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 40.000.000,00	
	- DESA RANTEWULU, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 40.000.000,00	
	- DESA BALUKANG 1, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 72.600.000,00	
	- Jalan Trans Palu-Donggala No.Km. 75, Sikara Tobata, Kec. Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah[, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 30.000.000,00	
	- Parisan Agung, Kec. Damsol, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah 94356 ....., Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 50.000.000,00	
	- Desa Sampeantaba, Kec. Bungku Timur, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Desa Bahomoahi, Kec. Bungku Timur, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Desa Bahoruru, Kec. bungku Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Desa Kaleroang, Kec Bungku Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Kel Tofoiso, Kec Bungku Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Desa Bahomante, Kec Bungku Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Desa Lanona, Kec Bungku Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Desa Soulove, Kec Sigibiromaru, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Desa Sibowi, Kec Tanambulava, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Desa Simoro, Kec Gumbasa, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Kel tanjung Batu, Kec Banawa, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Kel Maleni, Kec Banawa, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 140.000.000,00	
	- Desa Stadong Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 53.000.000,00	
	- Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 85.000.000,00	
	- Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 45.000.000,00	

	- Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 45.000.000,00	
	- Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 45.000.000,00	
	- Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 45.000.000,00	
	- Jln. Wahidin Lorong Bakso RT 02/RW 09 Kel Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jln. Mutiara Sakti Kel. Birobuli Utara Kec Palu Selatan Kota palu		Rp 100.000.000,00	
	- Jln. S Palayua RT 03/RW03 Kel. Taipa Kecamatan palu Utara Kota Palu		Rp 90.000.000,00	
	Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota PaluCendanapura, Kec. Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94765, Provinsi Sulawesi Tengah		Rp 90.000.000,00	
	- Jln. Letjen Soeprapto Kel. Talise Kec.Mantikulore Kota Palu		Rp 100.000.000,00	
	- Desa Leboni Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso		Rp 15.000.000,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah, selanjutnya kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa termuat pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 point g pada urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan Pemerintah dalam berbagai cara diantaranya dengan menempatkan desa sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini didasari pemahaman bahwa desa memiliki posisi sangat strategis dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana desa memiliki peran sebagai pendorong tumbuhnya potensi-potensi lokal desa di berbagai bidang yang ada. Selanjutnya untuk memposisikan desa sebagai motor penggerak utama pembangunan di desa maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang memberikan peran yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa, termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa. Desa yang pada beberapa dekade hanya menjadi obyek pembangunan, maka dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa tersebut menjadikan desa memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang mampu mendorong bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan aturan pemberian insentif/penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih fokus bekerja dalam melayani masyarakatnya.

Melalui Undang-undang Desa terbuka ruang yang luas bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang- undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka sehingga berkembang lebih pesat secara bersama.

Sejak beberapa dekade Pemerintahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dinilai menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya, namun dalam pelaksanaannya tetap diawasi agar tidak terjadi

penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum.

Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar- benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Dalam menjaga sinergitas pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintah daerah. Adapun kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien.
2. Berkembangnya status Pembangunan Desa.
3. Meningkatnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan Ketahanan Pangan Desa, penciptaan lapangan kerja untuk penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Sebagai Lembaga Teknis yang bertugas membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dalam Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2025-2029 dirumuskan arah kebijakan guna pencapaian tujuan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penguatan penataan kelembagaan desa guna penataan desa sesuai standar.
2. Fasilitasi penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Fasilitasi penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan yang didukung oleh Lembaga Ekonomi Masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana serta Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Fasilitasi penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai aktor perubahan sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian adat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tujuan Pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah **"Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa"**

Adapun Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai adalah " **Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa).**

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator serta target untuk pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa)	Indeks Desa (Indeks)	Indeks	72.63
			Persentase Desa Mandiri (%)	%	24.05
			Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya (Persentase)	%	61.54

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Visi Misi

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2029, bahwa visi pembangunan daerah adalah **Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029,** dan merumuskan 4 Misi Pembangunan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
2. Mewujudkan Masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Mewujudkan pembangunan infrastuktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, innovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh dan berlandaskan nilai religious dan kearifan lokal.

Berdasarkan RPJMD dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menjabarkan arahan RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Gubernur Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan mendukung misi sebagai berikut:

- Misi ke-1: Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
- Tujuan 1: Mewujudkan kualitas masyarakat Sulawesi Tengah yang berdaya saing.

- Sasaran 1:
    a. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyrakat;
    b. Meningkatnya kualitas pendidikan dan;
    c. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender

Sasaran strategis pertama yaitu "*Meningkatnya kualitas derajat Kesehatan masyarakat* ", sasaran strategis ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya peningkatan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kesehatan yang baik merupakan pondasi utama bagi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam perencanaan Pembangunan daerah.

Sasaran strategis kedua yaitu "Meningkatnya kualitas pendidikan", Dimana pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu melalui sasaran strategis "Meningkatnya kualitas pendidikan" sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat Sulawesi Tengah dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Pembangunan keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sasaran strategis ketiga yaitu "*Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender*" dalam RPJMD sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang harmonis, produktif, dan resilien.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik.

Reformasi Birokrasi Tematik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang mengamanatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu perangkat daerah pengampuh penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pengentasan kemiskinan bagi masyarakat.

- Misi ke- (2) : Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
- Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah.
- Sasaran 2 :

a. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif;
b. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

Sebagai Perangkat Daerah pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, maka

pelaksanaan kinerja yang dituangkan dalam program/kegiatan pada tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi-strategi sebagai berikut;

1. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri. Berdasarkan Indeks Desa Membangun ditargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan selanjutnya pada tahun 2025 ditargetkan tidak terdapat desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
6. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
7. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa

8. a (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
9. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Implementasi strategi-strategi tersebut diatas dalam upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonominya, akan tetapi permasalahan yang sering timbul adalah pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga ekonomi desa serta masyarakat miskin itu sendiri belum mampu untuk menjaga keberlangsungan hasil yang diperoleh masyarakat miskin dari program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan.

Selain itu selama ini upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat belum dapat tercapai secara optimal karena terdapat berbagai kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kewenangan, alokasi anggaran yang minim, koordinasi dan sinergitas program belum berjalan dengan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten serta pemanfaatan data penduduk miskin (by name& by addres) belum dilakukan.

- **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terdapat 5 Program yaitu Progam Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi, dan 4 Program strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan rincian Kegiatan serta Sub Kegiatan sebagai berikut:

(1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Bidang Sekretariat yakni Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub Kegiatan:
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkatdaerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD;

4. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkaopannya;
   - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

5. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

6. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan Sub Kegiatan :
   - Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan;
   - Pengadaan Mebel;
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   - Pengadaan Aset Tetap Lainnya;

7. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan:
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik;

- Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

(2). Program Penataan Desa

Program ini menunjang Terselenggaranya Kegiatan Penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa dan Desa Adat, dengan Sub Kegiatan terdiri dari:

- Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi Kewenangan Provinsi.
- Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat.
- Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa.
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa.

(3) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi, adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

(4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Adapun Sub Kegiatan yang Dilaksanakan terdiri dari;

- Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa
- Pembinaan Manajemen Pemerintah Desa;
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
- Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan;
- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa;
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
- Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan

Bantuan Teknis

- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa.
- Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa.
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa.
- Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa.
- Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa.
- Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dabn Desa Adat di Kabupaten/Kota.

(5) **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini menunjang Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota, adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan

Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarkat Hukum Adat;

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perilindungan Masyarakat Desa;
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah akan dilaksanakan di 12 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Penyebaran Lokasi dan analisis kebutuhan dana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Periode / Tahun : 2026

Prakiraan Maju : 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2,12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**Rp. 38.027.200.000**	**DAU**			**Rp.40.696.141.095,51**

2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**Provinsi dan 12 Kab**		**Rp 13.661.807.432**	**DAU**		**71,00**	**17.416.370.000**
2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**SAKIP**	**Provinsi dan 12 Kab**		**Rp 307.640.000**	**DAU**		**83,00**	**407.640.000**
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	5 dokumen	Rp 36.900.000	DAU		6 dokumen	Rp 36.900.000
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi dan 12 Kab	4 Laporan	Rp 20.740.000	DAU		5 Laporan	Rp 20.740.000
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi dan 12 Kab	6 Laporan	Rp 250.000.000	DAU		3 Laporan	Rp 350.000.000
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Realisasi Anggaran**	**Provinsi**	**97**	**Rp10.997.410.050**	**DAU**		**97**	**13.354.729.150**
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	64 orang/bulan	Rp 9.792.060.000	DAU		64 Orang	Rp 11.619.379.100

2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	1 Dokumen	Rp 1.125.350.000	DAU		12 Kegiatan	Rp 1.655.350.000
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	5 Laporan	Rp 80.000.050	DAU		13 Laporan	Rp 80.000.050
2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**Provinsi dan Kab**	**1 Dokumen**	**Rp 120.000.200**	**DAU**		**1 Dokumen**	**120.000.200**
		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		**1 Laporan**				2 Laporan	**120.000.200**
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Provinsi dan Kab	4 Laporan	Rp 120.000.200	DAU		1 Laporan	Rp 120.000.200
2.13.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (customer /Stakeholder)**	**Provinsi**	**90**	**Rp 284.000.650**	**DAU**		**92**	**284.000.650**

2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi	1 paket	Rp -	DAU		1 paket	Rp -
2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	4 Laporan	Rp 50.000.050	DAU		2 Dokumen	Rp 50.000.050
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	2 Laporan	Rp 64.000.250	DAU		1 Laporan	Rp 64.000.250
2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	95 org, 6 kali	Rp 120.000.200	DAU		140 orang	Rp 120.000.200
2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi dan 12 Kab	95 org, 2 Kali	Rp 50.000.150	DAU		5 orang	Rp 50.000.150
2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**Provinsi dan 12 Kab**	**1 Dokumen**	**Rp 762.871.770**	**DAU**		**1 Dokumen**	**980.000.000**

		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		**1 Laporan**				**1 Laporan**	**980.000.000**
2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi	3 paket	Rp 30.000.000	DAU		1 paket	Rp 30.000.000
2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi	6 paket	Rp 123.548.970	DAU		2 paket	Rp 200.000.000
2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi	4 paket	Rp -	DAU		1 paket	Rp -
2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi	8 paket	Rp 50.000.000	DAU		2 paket	Rp 80.000.000
2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi	4 paket	Rp 30.000.000	DAU		1 paket	Rp 30.000.000
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan 12 Kab	4 Laporan	Rp 529.322.800	DAU		2 Laporan	Rp 640.000.000

2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Provinsi**	**1 Dokumen**	**Rp 362.002.502**	**DAU**		**1 Dokumen**	**980.000.000**
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**1 Laporan**				**1 Laporan**	**980.000.000**
2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi	3 unit	Rp -	DAU		2 unit	Rp 500.000.000
2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi	32 Paket	Rp 68.387.000	DAU		32 set	Rp 140.000.000
2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi	2 Unit	Rp 293.615.502	DAU		86 unit, 2 paket	Rp 340.000.000
2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Provinsi	1 paket	Rp -			1 paket	Rp -

2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Provinsi**	**1 Laporan**	**Rp 328.532.260**	**DAU**		**1 Laporan**	**670.000.000**
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	4 Laporan	Rp -	DAU		0 Laporan	Rp -
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi	12 laporan	Rp 328.532.260	DAU		12 bulan	Rp 670.000.000
2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	Provinsi	**1 Dokumen**	**Rp 499.350.000**	**DAU**		**1 Dokumen**	**620.000.000**
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1 Laporan**				**1 Laporan**	**620.000.000**
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi	31 unit	Rp 181.350.000	DAU		34 unit	Rp 200.000.000

2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi	44 Unit	Rp 218.000.000	DAU		76 Unit	Rp 300.000.000
2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Provinsi	2 paket	Rp 100.000.000	DAU		1 Paket	Rp 120.000.000
2.13.02	**Program Penataan Desa**	**Presentase kelembagaan desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa Sesuai Standar**	**12 Kab**		**3.050.700.200**	**DAU**			**3.862.740.000**
2.13.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**12 Kab**	**1 Laporan**	**3.050.700.200**			**1 Laporan**	**3.862.740.000**
2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	12 Kab	2 Dokumen	Rp -	DAU		2 Dokumen	Rp -

2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	12 Kab	6 Dokumen	Rp 100.000.200	DAU		2 Dokumen	Rp 600.000.000
2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	12 Kab	39 Unit	Rp 2.950.700.000	DAU		20 unit	Rp 3.262.740.000
2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Presentase peningkatan perkembangan Desa melalui kerjasama desa**	**12 Kab**	**1,629**	**Rp 479.849.850**	**DAU**		**1,629**	**Rp 460.920.000**
2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Terfasilitasniya Kerjasama Antar Desa yang menjadi kewenangan Provinsi**	12 Kab	**1 Laporan**	**Rp 479.849.850**	DAU		**1 Laporan**	**Rp 460.920.000**
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	12 Kab	4 Dokumen	Rp 89.924.925	DAU		10 Dokumen	Rp 140.000.000

2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	12 Kab	8 Dokumen	Rp 89.924.925	DAU		10 Dokumen	Rp 140.000.000
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol, Morowali	6 Dokumen	Rp 300.000.000	DAU		10 Dokumen	Rp 180.920.000
2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien**	**12 Kab**		**5.056.001.050**	**DAU**			**5.270.350.000**
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**12 Kab**	**1 Laporan**	**Rp 5.056.001.050**	**DAU**		**1 Laporan**	**Rp 5.270.350.000**
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	12 Kab	2 Dokumen	Rp 144.000.400	DAU		4 Dokumen	Rp 164.000.300

2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	12 Kab	4 Dokumen	Rp -	DAU		5 Dokumen	Rp	64.349.300
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	12 Kab	1 Dokumen	Rp 100.000.200	DAU		4 Dokumen	Rp	100.000.000
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12 Kab	3 Dokumen	Rp 50.000.000	DAU		3 Dokumen	Rp	80.000.000
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Kab	5 Dokumen	Rp 300.000.000	DAU		3 Dokumen	Rp	500.000.000
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	12 Kab	5 Dokumen	Rp 80.000.250	DAU		3 Dokumen	Rp	130.000.250

2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	12 Kab	56 Org	Rp 250.000.050	DAU		100 org	Rp 200.000.000
2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	12 Kab	6 Dokumen	Rp 2.482.000.000	DAU		6 Dokumen	Rp 2.482.000.000
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	12 Kab	2 Dokumen	Rp 1.550.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp 1.300.000.000
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Kab	2 Dokumen	Rp 100.000.150	DAU		2 Dokumen	Rp 200.000.150
2.13.04.1.01.17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	12 Kab	6 Dokumen	Rp -	DAU		6 Dokumen	Rp -

2.13.04.1.01.20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	12 Kab	24 Desa	Rp -	DAU		24 Desa	Rp -
2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	12 Kab	1 Laporan	Rp -	DAU		1 Laporan	Rp 50.000.000
2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**12 Kab**		**15.778.841.468**	**DAU**			**13.685.761.096**

2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten**	12 Kab	**1 Laporan**	**15.778.841.468**	DAU		**1 Laporan**	**13.685.761.096**
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	2 Dokumen	Rp -	DAU		2 Dokumen	Rp -
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	13 Dokumen	Rp 100.000.000	DAU		13 Dokumen	Rp 200.000.000

2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	12 Kab	130 Lembaga	Rp 303.400.400	DAU		120 Lembaga	Rp 350.000.000
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Kab	126	Rp 13.803.440.000	DAU		40 unit	Rp11.136.761.095,51
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Kab	3 Dokumen	Rp 400.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp 599.000.000,00

2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Kab	2 Dokumen	Rp	250.000.000	DAU		2 Dokumen	Rp	300.000.000
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan BhaktiGotong Royong Masyarakat	12 Kab	3 Laporan	Rp	86.000.450	DAU		1 Laporan	Rp	150.000.000
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	12 Kab	3 Dokumen	Rp	86.000.618	DAU		3 Dokumen	Rp	200.000.000
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kab	5 Laporan	Rp	750.000.000	DAU		5 Laporan	Rp	750.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2026, disusun dalam rangka pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang mendukung Program Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan mendukung pencapaian Visi, Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 pada yaitu Misi ke-**Misi ke-1**, Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja dan **Misi ke-2**, Mewujudkan Masyarakat Bahagia Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Keadilan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja untuk pencapaian tujuan Meningkatkan Perkembangan Desa menuju Pembangunan yang Berkelanjutan adalah 5 Program, 8 Kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi, 4 kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, 28 sub kegiatan penunjang urusan pemerintah provinsi dan 33 sub kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan rincian program prioritas sebagai berikut:

(1) Program Penataan Desa

(2) Program Peningkatan Kerjasama Desa

(2) Program Administrasi Pemerintahan Desa

(4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Periode 2026

Tujuan	**Sasaran**	**Kode**	**Program dan Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2025)**	**Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan**		**Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**Lokasi**
						Tahun 2026			
						Target	**Rp**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2,12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**Rp 38.027.200.000**		

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	**Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**70,30**	**71,00**	**Rp 13.661.807.432**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi dan 12 Kab**
	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82,45**	**83,00**	**Rp 307.640.000**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi dan 12 Kab**
				Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah					
		2.13.01.1.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	Rp 36.900.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	2 Laporan	Rp 20.740.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab

				Kinerja SKPD					
		2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	Rp 250.000.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemerikaan (TLHP)	2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP**	**100%**	**100%**	**Rp 10.997.410.050**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi**
	Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu			**Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah**	**93,98**	**97%**			
		2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 orang/ 12 bulan	64 Orang	Rp 9.792.060.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi

		2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Kegiatan	Rp 1.125.350.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Rp 80.000.050	Dinas PMD Prov.	Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**Rp 120.000.200**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi dan Kab**
				Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**			
		2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Rp 120.000.200	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan Kab
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	2.13.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah**			**Rp 284.000.650**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi**

		2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 50.000.050	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	1 Laporan	Rp 64.000.250	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 orang	120 orang	Rp 120.000.200	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	3 orang	Rp 50.000.150	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah**			**Rp 762.871.770**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi dan 12 Kab**

	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal			**Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah**					
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)			**Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI**					
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah			**Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah**					
		2.13.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp 30.000.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	Rp 123.548.970	Dinas PMD Prov.	Provinsi

		2.13.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	Rp 50.000.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	Rp 30.000.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp 529.322.800	Dinas PMD Prov.	Provinsi dan 12 Kab
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	2.13.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE**	**80**	**90**	**Rp 362.002.502**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi**

				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**			
		2.13.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 set	2 set	Rp 68.387.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	2 paket	Rp 293.615.502	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.07.07	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah**	**Nilai**	**100**	**Rp 328.532.260**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi**

				Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	**86,33**	**86,33**			
		2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	Rp -	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 328.532.260	Dinas PMD Prov.	Provinsi
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**Rp 499.350.000**	**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi**
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**			

		2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	92 unit	92 unit	Rp 181.350.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	Rp 218.000.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
		2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	Rp 100.000.000	Dinas PMD Prov.	Provinsi
Meningkatnya pemerataan pembangunan wilayah pedesaan	**Meningkatnya Kemandirian Desa**			**Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)**	**0,27%**	**0.27 (ID)**		**Dinas PMD Prov.**	**Provinsi dan 12 Kab**
	Meningkatnya nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.02	**Program Penataan Desa**	**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**			**Rp 3.050.700.200**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**

	Meningkatnya sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	2.13.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**			**Rp 3.050.700.200**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
		2.13.02.1.01 .0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.02.1.01 .0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Desa yang terdampingi dalam pengaturan SOTK Pemerintahan Desa sesuai regulasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 100.000.200	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.02.1.01 .0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan Pemerintahan Desa yang terpenuhi	42 Unit	42 Unit	Rp 2.950.700.000		

	Meningkatnya nilai dimensi Ekonomi	2.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Nilai dimensi Ekonomi**			**Rp 479.849.850**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
	Meningkatnya sub dimensi Produksi Desa	2.13.03.1.01	**Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**Nilai sub Dimensi Produksi Desa**			**Rp 479.849.850**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
	Meningkatnya Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi			**Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi**					
		2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang terdampingi dalam kerjasama antar desa dan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 89.924.925	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang mengikuti bimbingan teknis kerjasama antara desa dan pihak ketiga	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp 89.924.925	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah BUMDesma yang terdampingi dalam peningkatan Potensi produk unggulan desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 300.000.000	Dinas PMD Prov.	Kab. Parigi Moutong, Poso, Donggala, Sigi, Buol,

									Morowali
	Meningkatnya nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**			**Rp 5.056.001.050**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
	Meningkatnya nilai dimensi Ekonomi			**Nilai dimensi Ekonomi**					
	Meningkatnya nilai dimensi Lingkungan			**Nilai dimensi lingkungan**					
	Meningkatnya nilai dimensi Aksebilitas			**Nilai dimensi Aksebilitas**					
	Meningkatnya sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**			**Rp 5.056.001.050**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**

	Meningkatnya Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi			**Nilai Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi**					
	Meningkatnya nilai sub dimensi pengelolaan lingkungan			**Nilai sub dimensi pengelolaan lingkungan**					
	Meningkatnya nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan			**Nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan**					
	Meningkatnya nilai sub dimensi Kondisi Kemudahan Akses			**Nilai sub dimensi Kemudahan Akses**					
	Meningkatnya Sub Dimensi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)			**Nilai Sub Dimensi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)**					

		2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	30 orang	52 orang	Rp 144.000.400	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Terselenggaranya pelaksanaan PILKADES di Kabupaten	-	12 Kab.			
				Jumlah Desa yang dapat mengaplikasikan Pelayanan Berbasis Digital	-	20 Desa			
		2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	30 Desa	28 Desa	Rp 100.000.200	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Desa yang memmanfaatkan Data Registrasi Sosial (REGSOSEK)	-	20 Desa			
		2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	Rp 50.000.000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang terevaluasi dalam perkembangan desa dan kelurahan (Epdeskel)	12 Desa / 13 Kel	12 Desa / 13 Kel	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Desa / 13 Kel	3 Dokumen	Rp 300.000.000		
		2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	100 orang	3 Dokumen	Rp 80.000.250	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	40 orang	140 Orang	Rp 250.000.050	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 2.482.000.000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0013	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Kabupaten yang terdampingi dalam Penyusunan Produk Hukum Desa	-	12 Kab		Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	208 BUMDes	36 BUMDesa	Rp 1.550.000.000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Bumdes yang memperoleh penyediaan sarana dan prasarana	13 BUMDes	2 BUMDes			
				Jumlah Bumdes yang terbimbing dalam peningkatan status	-	5 BUMDes			
				Jumlah Bumdes yang termonitoring	6 BUMDesa	4 BUMDes			
		2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 100.000.150	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Desa yang mengusulkan untuk diidentifikasi penetapan dan Penegasan Batas Desanya	4 Desa	4 Desa			

		2.13.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	-	-	Rp -	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah BPD yang Meningkat Kapasitasnya	-	70 BPD		Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0020	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	-	-		Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.04.1.01.0021	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	2 Kab	1 Laporan		Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.04.1.01.0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	-	-	Rp -		
	Meningkatnya nilai dimensi layanan dasar	2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Nilai dimensi layanan dasar**			**Rp 15.778.841.468**	**Dinas PMD Prov.**	**12 Kab**
	Meningkatnya nilai dimensi Sosial			**Nilai dimensi Sosial**					
	Meningkatnya nilai dimensi Ekonomi			**Nilai dimensi Ekonomi**					
	Meningkatnya nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa			**Nilai dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**					

	Meningkatnya Nilai Sub dimensi Pendidikan	2.13.05.1.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Sub dimensi Pendidikan**			**Rp 15.778.841.468**	**Dinas PMD Prov.**	12 Kab
	Meningkatnya Nilai Sub dimensi Kesehatan			**Nilai Sub dimensi Kesehatan**					
	Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Utilitas Dasar			**Nilai Sub Dimensi Utilitas Dasar**					
	Meningkatnya sub dimensi Produksi Desa			**Nilai sub Dimensi Produksi Desa**					
	Meningkatnya sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa			**Nilai sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa**					

		2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	-		Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	13 Dokumen	13 Dokumen	Rp 100.000.000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	170 Lembaga	130 Lembaga	Rp 303.400.400	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	101 Unit	126 Unit	Rp 13.803.440.000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
		2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	90 orang	3 Dokumen	Rp 400.000.000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah Bumdes yang memperoleh sarana pengembangan Usaha ekonomi kreatif masyarakat	3 BUMDes	2 BUMDes			

		2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20 Posyantek	2 Dokumen	Rp 250.000.000	Dinas PMD Prov.	12 Kab
				Jumlah posyantek yang mempeeroleh sarana penerapan dan pemanfaatan Teknolgi Tepat Guna untuk potensi produk unggulan desa	2 Posyantek	2 Posyantek			
		2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	80 orang	1 Laporan	Rp 86.000.450		
		2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	164 buah/2 Kab	3 Dokumen	Rp 86.000.618	Dinas PMD Prov.	12 Kab

		2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	585 TP PKK	5 Laporan	Rp 750.000.000	Dinas PMD Prov.	12 Kab

BAB V
PENUTUP

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat desa dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan melalui pengaturan dan pengendalian yang prosesnya sistematis dalam upaya pengembangan potensi yang dimiliki sehingga masyarakat di perdesaan mampu mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pembangunan di desa yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Salah satu upaya memberdayakan masyarakat dan desa di Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan implementasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dituangkan dalam kinerja program,kegiatan dan sub kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara teknis dituangkan dalam Rencana Kerja perangkat daerah.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan perangkat daerah terkait dengan lebih optimal dalam menciptakan Good Governance.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, dimana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit kerja diharapkan dapat melaksanakan Rencana Kerja dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara sistematis dan konsisten.

Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Organisasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026

No	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program
3	Kepala Bidang	Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan

4	Kasubag dan Kasubid	Penanggung Jawab Pelaksana Sub Kegiatan
5	Para JFU/Staf di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawes Tengah	Pelaksana Input dan Operasional Penyelenggara Kegiatan, Sub Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kerja

5.2 PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun sebagai pedoman yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur sebagai pelaksana kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 20 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 1986003 1 009